SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN SWEDIA TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;

b. bahwa untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia pada tanggal 20 Desember 2016 di Jakarta, Indonesia, telah ditandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Sweden concerning Cooperation in the Field of Defence*);

c. bahwa. . .

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional di bidang pertahanan dilakukan dengan undang-undang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Sweden concerning Cooperation in the Field of Defence*);

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan. . .

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN SWEDIA TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE*).

Pasal 1

(1) Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Sweden concerning Cooperation in the Field of Defence*) yang telah ditandatangani pada tanggal 20 Desember 2016 di Jakarta, Indonesia.

(2) Salinan naskah asli Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Sweden concerning Cooperation in the Field of Defence*) dalam bahasa Indonesia, bahasa Swedia, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2020
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2020
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 247

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lydia Silvanna Djaman

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN SWEDIA TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE*)

I. UMUM

Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup suatu negara. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, Indonesia menjalin kerja sama di bidang pertahanan yang merupakan faktor penting guna meningkatkan hubungan baik antarnegara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara.

Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Swedia diwujudkan dalam bentuk Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Sweden concerning Cooperation in the Field of Defence*) yang telah ditandatangani pada tanggal 20 Desember 2016 di Jakarta, Indonesia, yang selanjutnya disebut Persetujuan, perlu disahkan dengan Undang-Undang.

Materi. . .

Materi muatan dalam Persetujuan antara lain:

1. Ruang lingkup kerja sama mencakup:
   a. pertukaran informasi dan pengalaman tentang isu-isu yang menjadi kepentingan bersama termasuk aspek politik-militer dan isu keamanan maritim internasional;
   b. pertukaran informasi dan praktik terbaik, serta memajukan kerja sama antara instansi masing-masing Pihak di bidang penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta lembaga terkait lainnya;
   c. pengembangan kerja sama dan pertukaran pengalaman di bidang logistik dan pemeliharaan, atas dasar saling menguntungkan dan persetujuan dari Para Pihak;
   d. pendukungan atas pengembangan kerja sama dalam bidang industri pertahanan yang dapat mencakupi transfer teknologi, penelitian bersama, produksi bersama, pemasaran bersama, dan juga jaminan kualitas;
   e. pengembangan dan peningkatan pelatihan dan pendidikan di bidang pertahanan dan militer pada semua tingkatan, termasuk personel sipil pada Kementerian Pertahanan;
   f. pengembangan kegiatan yang mengarah pada kerja sama dalam kedokteran militer dan pelayanan kesehatan militer; dan
   g. bidang kerja sama yang disepakati bersama.
2. Instansi berwenang dan peraturan pelaksanaan Persetujuan.
3. Kerahasiaan yang dipertukarkan atau dihasilkan dalam Persetujuan.
4. Pelindungan hak kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan Persetujuan.
5. Penyelesaian perselisihan yang timbul dari Persetujuan.
6. Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan Persetujuan.
7. Ketentuan mengenai perubahan, pemberlakuan, dan pengakhiran Persetujuan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6574

REPUBLIK INDONESIA

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

AND

THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN

CONCERNING

COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Sweden hereinafter referred to as the "Parties";

Desiring to enhance and strengthen the existing bilateral relations between the two countries through cooperative activities in the field of defence based on the principles of equality, mutual trust, and understanding;

Noting that the strengthening of defence cooperation will contribute to the mutually beneficial relations of both Parties;

Having a purpose of strengthening connections between the Armed Forces of the Republic of Indonesia and the Armed Forces of the Kingdom of Sweden;

Respecting sovereignty and territorial integrity of both Parties;

Pursuant to the prevailing laws and regulations of the two countries;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1
PURPOSE

The purpose of this Agreement is to provide a general framework for promoting bilateral cooperation in the field of defence, including military to military cooperation, based on the principles of equality, reciprocity and mutual benefit.

ARTICLE 2
SCOPE OF COOPERATION

The scope of cooperation of this Agreement may include:

1. Exchanging information and experiences on issues of common concerns including political-military aspects and international maritime security issues.
2. Exchanging information and best practices, and advancing cooperation between the Parties' respective research and development and science and technology agencies and other relevant institutions.
3. Developing cooperation and exchanging experiences in the area of logistics support and maintenance, on the basis of mutual benefit and mutual consent of both Parties.
4. Supporting the development of cooperation in the field of defence industry which may include transfer of technology, joint research, joint production and joint marketing as well as quality assurance.
5. Developing and enhancing defence and military training and education in all levels, including civilian defence personnel.
6. Developing activities that lead to cooperation on military medicine and health services.
7. Other areas of cooperation as mutually agreed.

ARTICLE 3
AUTHORISED AGENCIES AND IMPLEMENTING ARRANGEMENT

1. For the purpose of implementation of this Agreement, the Authorised Agencies are:
   a. For the Government of the Republic of Indonesia–The Ministry of Defence of the Republic of Indonesia.
   b. For the Government of the Kingdom of Sweden-The Ministry of Defence of the Kingdom of Sweden.
2. To monitor and implement this Agreement, the Authorised Agencies will meet when needed, at times to be jointly decided by the Parties with a view to exchange information on defence related matters of mutual interest.

3. To promote cooperation within the scope and areas relevant to this Agreement, the Parties may decide to establish "ad hoc" working groups with representatives from each Party.
4. For the purpose of implementing Article 2 of this Agreement, separate written arrangements may be concluded between the Parties.

ARTICLE 4
CONFIDENTIALITY

1. The protection, disclosure and transmission of classified information exchanged or generated within the framework of this Agreement will be handled and safeguarded in accordance with the national laws and regulations of each Party.
2. The Parties shall not disclose, release or transfer any classified information or materials generated within the framework of this Agreement to any third party, without prior written consultation between the Parties.

ARTICLE 5
PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

The protection and distribution of intellectual property rights including protection of a third party's legitimate right, as well as the consideration of equitable portion of ownership based on the contribution of the respective Parties, shall be arranged through separate written arrangements by the Parties on the specific areas of cooperation. The Parties shall arrange this in accordance with their respective domestic legislation and international agreements, which the Parties are parties to.

ARTICLE 6
SETTLEMENT OF DISPUTES

Any matter arising on the interpretation or implementation from this Agreement shall be settled through mutual consultation or negotiation between the Parties.

ARTICLE 7
AMENDMENTS

This Agreement may be amended or revised based on the mutual consent of the Parties in the form of a protocol and shall form an integral part of this Agreement.

ARTICLE 8
EXPENSES

Unless otherwise decided by the Parties in separate implementing arrangements and in accordance with its budgetary allocation, each Party shall bear its own respective expenses in the implementation of this Agreement.

ARTICLE 9
ENTRY INTO FORCE AND TERMINATION

1. This Agreement shall enter into force on the date of the last written notification of the fulfillment of the necessary internal procedures for the entry into force have been completed by the Parties.
2. This Agreement shall remain in force for a period of 5 (five) years and shall automatically be extended for subsequent periods of 5 (five) years. Either Party may terminate this Agreement by giving written notification at least 6 (six) months prior to the date of its intended termination.
3. Termination of this Agreement shall not affect the validity or duration of any activities that were ongoing prior to the termination, unless agreed otherwise by the Parties.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE in Jakarta on this twentieth of December in the year two thousand and sixteen, in the Indonesian, Swedish, and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

RYAMIZARD RYACUDU
MINISTER OF DEFENCE

FOR THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN,

PETER HULTQVIST
MINISTER OF DEFENCE



REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN

ANTARA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

DAN

PEMERINTAH KERAJAAN SWEDIA

TENTANG

KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia yang selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak";

Berkeinginan untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral yang ada antara kedua negara melalui kegiatan kerja sama di bidang pertahanan yang didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan, saling percaya dan pengertian;

Memerhatikan bahwa penguatan kerja sama pertahanan akan berkontribusi pada hubungan yang saling menguntungkan bagi kedua Pihak;

Bertujuan untuk memperkuat hubungan antara Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan Bersenjata Kerajaan Swedia;

Menghormati kedaulatan dan integritas wilayah dari kedua Pihak;

Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di kedua negara;

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1
TUJUAN

Tujuan dari Persetujuan ini adalah memberikan kerangka umum untuk mendorong kerja sama bilateral di bidang pertahanan, termasuk kerja sama antar militer, berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, timbal balik, dan saling menguntungkan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama dari Persetujuan ini mencakupi:

1. Pertukaran informasi dan pengalaman tentang isu-isu yang menjadi kepentingan bersama termasuk aspek politik-militer dan isu keamanan maritim internasional.
2. Pertukaran informasi dan praktik terbaik, serta memajukan kerja sama antar instansi masing-masing Pihak di bidang penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta lembaga terkait lainnya.
3. Pengembangan kerja sama dan pertukaran pengalaman di bidang dukungan logistik dan pemeliharaan, atas dasar saling menguntungkan dan persetujuan dari Para Pihak.
4. Pendukungan atas pengembangan kerja sama dalam bidang industri pertahanan yang dapat mencakupi transfer teknologi, penelitian bersama, produksi bersama, pemasaran bersama, dan juga jaminan kualitas.
5. Pengembangan dan peningkatan pelatihan dan pendidikan di bidang pertahanan dan militer pada semua tingkatan, termasuk personel sipil pada Kementerian Pertahanan.
6. Pengembangan kegiatan yang mengarah pada kerja sama dalam kedokteran militer dan pelayanan kesehatan militer.
7. Bidang kerja sama lain yang disepakati bersama.

PASAL 3
INSTANSI BERWENANG DAN PERATURAN PELAKSANAAN

1. Untuk tujuan pelaksanaan Persetujuan ini, instansi Berwenang adalah:
   a. Untuk Pemerintah Republik Indonesia–Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
   b. Untuk Pemerintah Kerajaan Swedia–Kementerian Pertahanan Kerajaan Swedia.
2. Untuk memantau dan melaksanakan Persetujuan ini, instansi Berwenang akan bertemu bila diperlukan, pada waktu yang disepakati bersama oleh Para Pihak dengan maksud untuk bertukar informasi mengenai hal-hal terkait pertahanan yang menjadi kepentingan bersama.
3. Untuk mendorong kerja sama dalam ruang lingkup dan bidang yang relevan dengan Persetujuan ini, Para Pihak dapat memutuskan untuk mendirikan kelompok kerja *ad hoc* dengan perwakilan dari masing-masing Pihak.
4. Untuk tujuan pelaksanaan Pasal 2 dari Persetujuan ini, pengaturan tertulis terpisah dapat disusun oleh Para Pihak.

PASAL 4
KERAHASIAAN

1. Pelindungan, pengungkapan, dan transmisi informasi rahasia yang dipertukarkan atau dihasilkan dalam kerangka Persetujuan ini akan ditangani dan dijaga sesuai dengan hukum nasional dan peraturan masing-masing Pihak.
2. Para Pihak tidak boleh mengungkapkan, mengeluarkan, atau memindahkan informasi atau bahan rahasia yang dihasilkan dalam kerangka Persetujuan ini kepada pihak ketiga, tanpa berkonsultasi tertulis antara Para Pihak

PASAL 5
PELINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pelindungan dan distribusi hak kekayaan intelektual termasuk pelindungan hak pihak ketiga, serta penimbangan bagian kepemilikan yang adil berdasarkan kontribusi dari masing-masing Pihak, akan diatur melalui pengaturan tertulis yang terpisah oleh Para Pihak mengenai bidang kerja sama tertentu. Para Pihak akan mengatur hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan masing-masing Pihak dan perjanjian internasional yang Para Pihak menjadi pihak dalam perjanjian tersebut.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul dari interpretasi atau implementasi Persetujuan ini akan diselesaikan melalui konsultasi atau negosiasi bersama antara Para Pihak.

PASAL 7
PERUBAHAN

Persetujuan ini dapat diubah atau direvisi berdasarkan persetujuan bersama Para Pihak dalam bentuk protokol dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.

PASAL 8
BIAYA-BIAYA

Kecuali disepakati berbeda oleh Para Pihak dalam pengaturan pelaksanaan terpisah dan sesuai dengan alokasi anggarannya, masing-masing Pihak akan menanggung biaya mereka sendiri dalam hal pelaksanaan Persetujuan ini.

PASAL 9
PEMBERLAKUAN DAN PENGAKHIRAN

1. Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan tertulis terakhir dari pemenuhan persyaratan prosedur internal oleh Para Pihak.
2. Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan secara otomatis diperpanjang setiap 5 (lima) tahun berikutnya. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.
3. Pengakhiran Persetujuan ini tidak memengaruhi keabsahan atau jangka waktu dari setiap kegiatan yang sedang berjalan sebelum pengakhiran, kecuali disetujui berbeda oleh Para Pihak.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, telah diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

DITANDATANGANI di Jakarta pada tanggal dua puluh bulan Desember tahun dua ribu enam belas, dalam bahasa Indonesia, bahasa Swedia, dan bahasa Inggris, semua naskah adalah autentik. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah bahasa Inggris yang berlaku.

UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,	UNTUK PEMERINTAH KERAJAAN SWEDIA,
RYAMIZARD RYACUDU	PETER HULTQVIST
MENTERI PERTAHANAN	MENTERI PERTAHANAN

REPUBLIK INDONESIA

AVTAL

MELLAN

REPUBLIKEN INDONESIENS REGERING

OCH

KONUNGARIKET SVERIGES REGERING

OM

FÖRSVARSSAMARBETE

Republiken Indonesiens regering och Konungariket Sveriges regering (nedan kallade *parterna*),

som önskar utöka och förstärka de existerande bilaterala förbindelserna mellan de båda länderna genom samarbetsaktiviteter på försvarsområdet som bygger på principerna om jämlikhet, ömsesidigt förtroende och ömsesidig förståelse,

som noterar att det förstärkta försvarssamarbetet kommer att bidra till parternas ömsesidigt fördelaktiga förbindelser,

som syftar till att stärka förbindelserna mellan Republiken Indonesiens försvarsmakt och Konungariket Sveriges försvarsmakt,

som respekterar båda parters suveränitet och territoriella integritet,

har, i enlighet med de båda ländernas gällande lagar och andra författningar,

kommit överens om följande:

ARTIKEL 1
SYFTE

Syftet med detta avtal är att skapa en allmän ram för främjande av bilateralt samarbete på försvarsområdet, inklusive militärt samarbete, baserat på principerna om jämlikhet, ömsesidigt förtroende och ömsesidig förståelse.

ARTIKEL 2
SAMARBETETS OMFATTNING

Detta avtals tillämpningsområde kan innefatta:

1. Utbyte av information och erfarenheter i frågor av gemensamt intresse, inklusive försvarspolitiska aspekter och internationella sjöfartsskyddsfrågor.
2. Utbyte av information och goda metoder samt förbättrat samarbete mellan parternas respektive organ för FoU och vetenskap och teknik och andra berörda institutioner.
3. Samarbetsutveckling och utbyte av erfarenheter inom området logistiskt understöd och underhåll, baserat på de båda parternas ömsesidiga nytta och gemensamma överenskommelser.
4. Stöd till utveckling av samarbete på försvarsindustriområdet, vilket kan innefatta tekniköverföring, gemensam forskning, gemensam produktion, gemensam marknadsföring och kvalitetssäkring.
5. Utveckling och förbättring av militär- och försvarsrelaterad utbildning samt utbildning på samtliga nivåer, inklusive civilförsvarspersonal.
6. Utveckling av samarbetsskapande aktiviteter inom militärmedicin och militär hälso- och sjukvård.
7. Andra samarbetsområden som parterna kommer överens om.

ARTIKEL 3
BEHÖRIGA MYNDIGHETER SAMT TILLÄMPNINGSÖVERENSKOMMELSER

1. Följande behöriga myndigheter ansvarar för att tillämpa detta avtal:
   a. För Republiken Indonesiens regering: Indonesiens försvarsdepartement.
   b. För Konungariket Sveriges regering: Sveriges försvarsdepartement.
2. De behöriga myndigheterna ska mötas vid behov, enligt vad parterna kommer överens om gemensamt, för att övervaka och tillämpa detta avtal och utbyta information om försvarsrelaterade frågor av gemensamt intresse.
3. För att främja samarbete inom detta avtals tillämpningsområde får parterna besluta om att inrätta tillfälliga arbetsgrupper med företrädare för båda parter.

4. Parterna får sinsemellan ingå skriftliga avtal i syfte att tillämpa artikel 2 i detta avtal.

ARTIKEL 4
SEKRETESS

1. Skydd, delgivning och överföring av sekretessbelagd information som utbytts eller genererats inom ramen för detta avtal ska behandlas och skyddas i enlighet med parternas respektive nationella lagar och andra författningar.
2. Avtalsparterna får inte röja, lämna ut eller överföra sekretessbelagda uppgifter eller sekretessbelagt material som framställts inom ramen för detta avtal till tredje part utan att detta föregåtts av skriftligt samråd mellan partnerna.

ARTIKEL 5
SKYDD AV IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Skydd och fördelning av immateriella rättigheter, inklusive skydd av tredje parts legitima rättigheter, samt bedömning av hur ägande av immateriella rättigheter ska fördelas rättvist utifrån respektive avtalsparts bidrag ska regleras mellan parterna genom separata skriftliga överenskommelser rörande de specifika samarbetsområdena. Parterna ska reglera detta i enlighet med sina respektive nationella lagar och andra författningar och internationella avtal.

ARTIKEL 6
TVISTLÖSNING

Alla frågor som uppstår i samband med tolkningen eller tillämpningen av detta avtal ska lösas genom samråd eller förhandlingar mellan parterna.

ARTIKEL 7
ÄNDRINGAR

Detta avtal får ändras eller omarbetas efter överenskommelse mellan parterna i form av ett protokoll som ska utgöra en integrerad del av detta avtal.

ARTIKEL 8
OMKOSTNADER

Varje part ska stå för sina kostnader i samband med tillämpningen av detta avtal, såvida inget annat fastställts av parterna i separata tillämpningsöverenskommelser och i överensstämmelse med budgetmedlen.

ARTIKEL 9
IKRAFTTRÄDANDE OCH UPPSÄGNING

1. Detta avtal träder i kraft den dag då den sista skriftliga underrättelsen från parterna tas emot, vari anges att parterna slutfört de nationella förfaranden som är nödvändiga för dess ikraftträdande.
2. Detta avtal ska gälla i 5 (fem) år och därefter automatiskt förlängas i perioder om 5 (fem) år. Varje part får säga upp detta avtal genom skriftlig underrättelse minst 6 (sex) månader före den dag då uppsägningen ska träda i kraft.
3. Uppsägningen av detta avtal påverkar varken giltigheten eller giltighetstiden för aktiviteter som har påbörjats före uppsägningen, såvida inte avtalsparterna har kommit överens om något annat.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade av sina respektive regeringar, undertecknat detta avtal.

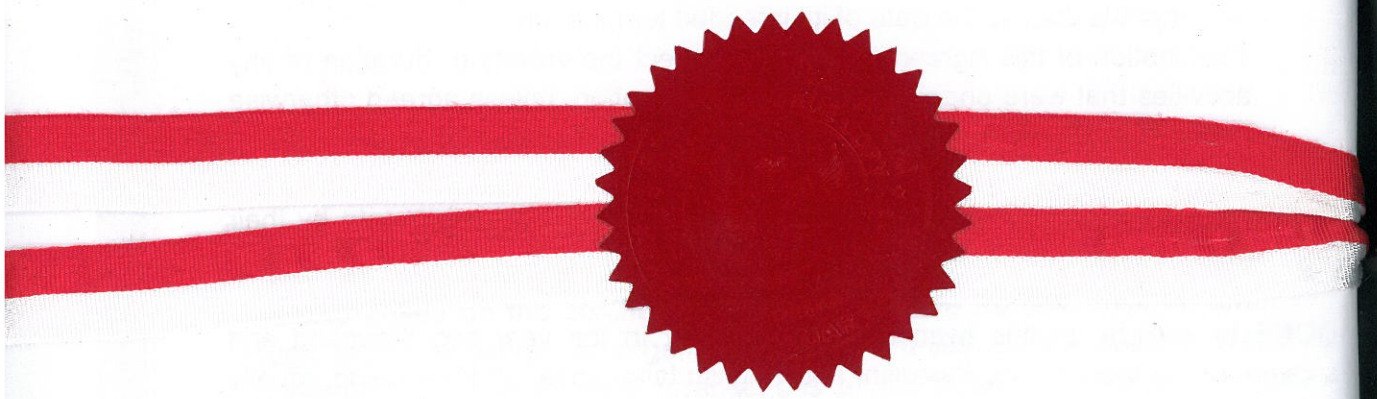
UPPRÄTTAT i Jakarta, den tjugonde december år 2016 på indonesiska, svenska och engelska, vilka samtliga texter har samma giltighet. Vid skiljaktiga tolkningar ska den engelska texten gälla.

FÖR REPUBLIKEN INDONESIENS REGERING

RYAMIZARD RYACUDU
FÖRSVARSMINISTER

FÖR KONUNGARIKET SVERIGES REGERING

PETER HULTQVIST
FÖRSVARSMINISTER



Salinan naskah resmi
Certified true copy

Nomor : 0133/CTC/12/2020/52
Number

Sahadatun Donatirin
NIP. 19740603 199803 2 001

Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
Kementerian Luar Negeri, Republik Indonesia
Secretary of Directorate General for Legal Affairs and International Treaties
Ministry of Foreign Affairs, Republic of Indonesia

Tanggal : Desember 2020
Date